

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anjar Agus dkk. (2021). *Pemerintahan Daerah, Desa dan Kelurahan*. Yogyakarta: Deepublish hlm 1
- Dadang. (2021). *Kedudukan dan Fungsi Rekomendasi DPRD dalam Penyelenggaraan Kewenangan Perizinan*. Banyumas: CV. Pena Persada. Hlm. 47-49
- Manan Abdul, *Dinamika Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2018), h.73.
- Maringan Masry Simbolon, *Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen*, h. 61.
- Rahayu Sri Ani. Sinar Grafika Rawamangun Jakarta. *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya*. (Jakarta: Sinar Grafika: 2018). Hal 5

Jurnal dan Skripsi

- Rahayuningsih Eka. Tesis. *Implementasi Kebijakan Penyaluran dan Pemanfaatan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Pada Korban Covid-19 di Desa Bulumargi Perspektif Masalah*. 2021. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Hal 1
- Wati Laras Dessy. Skripsi. *Peranan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Pada Perekonomian Masyarakat Miskin Yang Terkena Dampak Covid-19 Di Kanagarian Simalanggang Kecamatan Payakumbuh Kabupaten 50 Kota Ditinjau Menurut Menurut Ekonomi Syariah*. 2021. UIN Riau. Hal 1
- Baso Iping, “Perindungan Sosial Melalui Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT)”, dalam Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial, Volume 1, Issue 2, Juli 2020, h. 517
- Pramusya Arisnanda Muhammad. Skripsi. *Implementasi Kebijakan Pemberian Bantuan Sosial Non Tunai Bagi Masyarakat Terdampak Pandemi Covid-19 Di Kelurahan*

Pabuaran Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor". 2022. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Hal 3

Sofie Khomarul Laili Arviolita. Skripsi. *Implementasi program pengembangan pendamping usaha kecil menengah pada dinas koperasi kota Tangerang selatan*. Tahun 2021., (Jakarta: Unas). Hal 34

Rahmansyah Akhmad dkk. 2019. *Diponegoro Law Jurnal. Pelaksanaan fungsi pengawasan dewan perwakilan rakyat daerah terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah kota semarang tahun 2017*. Volume 8, Nomor 1, Tahun 2019

Oktarina Ayu. Skripsi. *Strategi Public Relations dalam Mempertahankan Citra Positif Dprd Kabupaten Rejang Lebong*. 2019.(Curup: IAIN), Hal 4-5

Rokim. *Analisis Kebijakan Versi Dunn & Implementasinya Dalam Pendidikan Islam*. Vol.14, No.2, Desember 2019. Jurnal Studi Islam. Hal 63

Dasar Hukum

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3)

Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Pasal 208 ayat (1) undang-undang No.23 Tahun 2014

Pasal 100 Undang-undang No.23 Tahun 2014

Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 Tahun 2019

Website

<https://dinsos.bogorkab.go.id/visi-misi/>

<https://dinsos.bogorkab.go.id/profil/>

